

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Araba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ardian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Ed. 1. Cet Ke-6, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Murjiyanto, Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet Ke-3, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*, Bandung, Mandar Maju.
- Iman Sudiyat, 1982, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Yogyakarta, Liberty.
- I Wayan Saundra, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Selo Soemardjan, 1991, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana Press.

### Internet

- MI Dani Putra, *Keberadaan Sultan Ground sebagai Dasar Pertanahan Keraton Kesultanan di Indonesia*, 16 April 2015, [http://ivaa-online.org/2015/04/16/keberadaan-sultan-ground-sebagai-dasar-pertanahan-kesultanan -diindonesia-2/](http://ivaa-online.org/2015/04/16/keberadaan-sultan-ground-sebagai-dasar-pertanahan-kesultanan-diindonesia-2/)., diakses pada hari Selasa, 06 Desember 2016, Pukul 22.03 WIB.

### **Jurnal**

Buyung Ridwan Tanjung, “Undang-Undang Keistimewaan DIY: Jawaban Atas Perdebatan Status Kepemilikan Sultanaat Ground Sejak Reforma Agraria 1960 (?)”, *Ombudsman Daerah*, VIII, (Juli-Desember 2013)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa DIY No.1 tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY.

### **Skripsi**

Aghisna Nurfahmi Fauziah, 2017, “Aspek Hukum Tanah Magersari di Keraton Yogyakarta (Studi atas Status Tanah Keraton di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.